



MEWUJUDKAN KAB/KOTA TANGGUH BENCANA (*MAKING CITIES RESILIENT*) 2030 DI INDONESIA

Dr. Agus Wibowo – Direktur Pengembangan Strategi PB BNPB



konteks

Mengapa kabupaten kota mengalami peningkatan risiko bencana?

- **Pertambahan penduduk dan peningkatan kepadatan. Kabupaten, terutama di Jawa mengalami proses transformasi menjadi kota, proyeksi penduduk tinggal di 'urban areas' tahun 2045: 85%**
- **Dukungan sumber daya (dana, SDM dan tata kelola) yang masih minim untuk menempatkan aspek pengurangan risiko bencana sebagai salah satu dasar dalam pembangunan.**
- **Kurangnya investasi PRB lintas sektor karena PRB dianggap 'biaya untuk sesuatu yang belum tentu terjadi' dan bukan 'investasi untuk mengurangi risiko'**

konteks



Mengapa kabupaten kota mengalami peningkatan risiko bencana?

- **Penurunan kualitas ekosistem karena kegiatan manusia yang mengancam kemampuan dan ketersediaan layanan lingkungan seperti perlindungan terhadap banjir.**
- **Usia infrastruktur yang semakin menua dan standar bangunan yang tidak aman yang dapat mengakibatkan keruntuhan bangunan.**
- **Dampak perubahan iklim yang menaikkan atau menurunkan suhu, curah hujan dan gelombang ekstrim berpengaruh terhadap frekuensi, intensitas dan cakupan lokasi bencana terkait iklim.**

konteks

Mengapa kabupaten kota mengalami peningkatan risiko bencana?



“Saya menyerukan agar para pemimpin dunia menangani perubahan iklim dan mengurangi peningkatan risiko bencana – dan pemimpin dunia harus melibatkan para walikota, kota-kota kecil dan para pemimpin masyarakat”

**Ban Ki-Moon- Sekjen PBB
(Agustus 2009)**

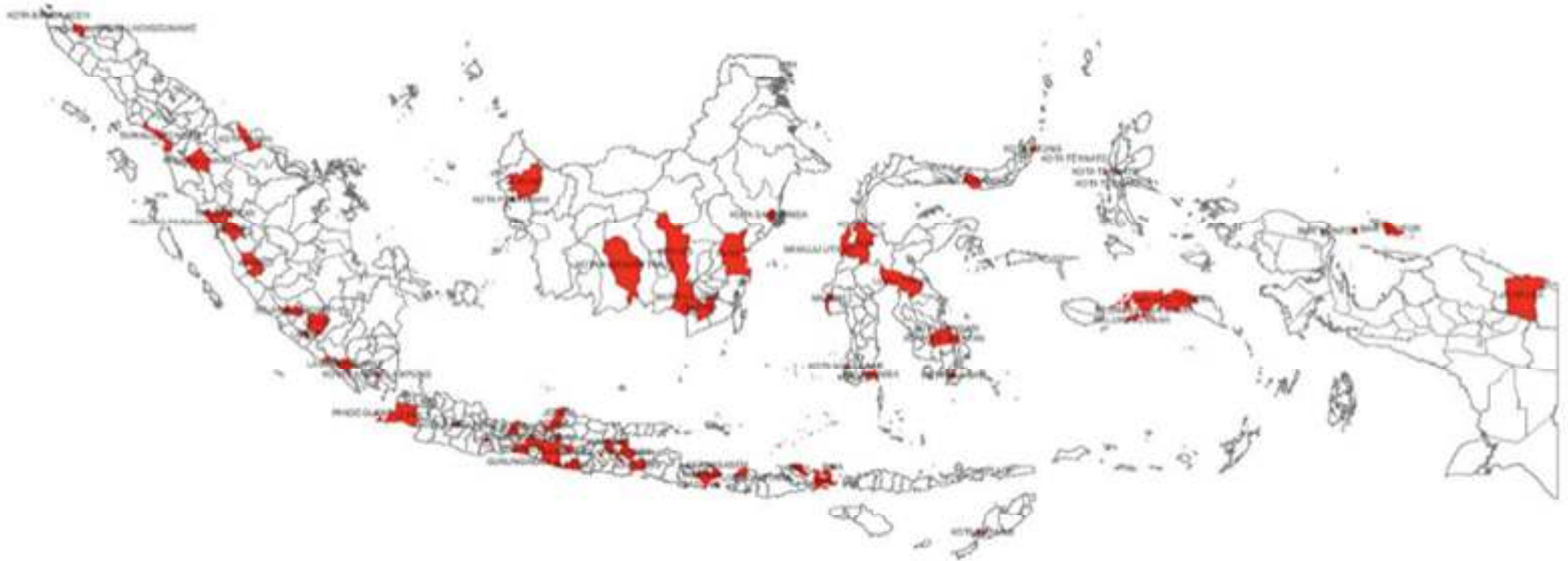
definisi

Indonesia tangguh bencana



“Kab/Kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya.”

Kab/Kota Tangguh di Indonesia (Tahun 2012-2020)



Penilaian Kab/Kota Tangguh di Indonesia (2012-2020)

2012 (LGSAT)	2013 (LGSAT)	2014 (LGSAT)	2015 (SC)	2016 (SC)	2016 (LUI BNPB)	2017	2018 (SC)	2019 (SC)	2020 (SC PHA)
Prov. Sumbar Prov. DIY Kab. Pariaman Kab. Sleman Kab. Bantul Kota Makasar	Kab. Pidie Jaya Kab. Padang Lawas Kab. Solok Kab. Kerinci Kab. Rejang Lebong Kab. Pandegelang Kab. Kebumen Kab. Gunung Kidul Kab. Pasuruan Kab. Gianyar Kab. Lombok Utara Kab. Paser Kab. Barito Kuala Kab. Kotawaringin Timur Kab. Sigi	Kab. Banjar Kab. Biak Numfor Kab. Bulukumba Kab. Gianyar Kab. Kapuas Kab. Kebumen Kab. Kerinci Kab. Lahat Kab. Lampung Barat Kab. Landak Kab. Lebak Kab. Lombok Utara Kab. Majene Kab. Paser Kab. Rejang Lebong	Kab. Pacitan Kab. Rejang Lebong Kota Banda Aceh Kota Bau-Bau Kota Samarinda	Kab. Boyolali Kab. Demak Kab. Jepara Kab. Klaten Kab. Magelang Kab. Pemalang Kab. Wonosobo Kot. Pekalongan Kota Semarang Kab. Bima Kota Ambon Kota Banda Aceh Kota Bandar Lampung Kota Bitung Kota Denpasar Kota Gorontalo Kota Samarinda Kota Semarang Kab. Jombang Kab. Konawe Selatan Kab. Maluku Tengah Kab. Sidoarjo Kota Ambon Kota Batu Kota Blitar Kota Kendari Kota Malang Kota Mojokerto	Kab. Bima Kota Ambon Kota Banda Aceh Kota Bandar Lampung Kota Bitung Kota Denpasar Kota Gorontalo Kota Samarinda Kota Semarang	Kab. Jombang Kab. Konawe Selatan Kab. Maluku Tengah Kab. Sidoarjo Kota Ambon Kota Batu Kota Blitar Kota Kendari Kota Malang Kota Mojokerto	Kota Jayapura Kota Pontianak Kab. Luwu Timur Kab. Tabanan Kab. Badung	Kota Kediri Kab. Lumajang Kota Ambon	Kota Semarang Kota Samarinda Kab. Lumajang Kab. Badung

PENCANANGAN KOTA TANGGUH DI PROVINSI JAWA TENGAH

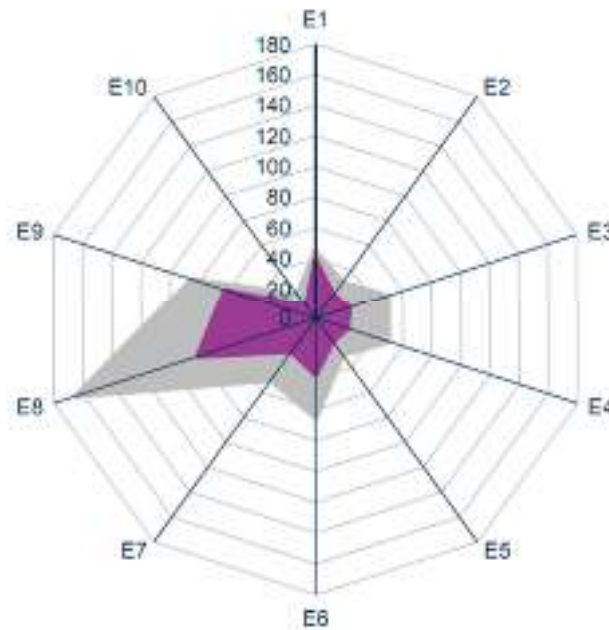
Gubernur Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran pimpinan daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, telah berkomitmen untuk menjadikan kabupaten dan kota di provinsi ini sebagai bagian dari jaringan Kabupaten/Kota Tangguh Dunia.

Wonogiri, 27 November 2015

CILACAP, 2017



- Kerjasama antara BNPB dan UNDRR, didanai oleh Uni Eropa
- Dokumen Rencana Aksi Kabupaten Cilacap dibuat selama kegiatan berlangsung
- Kegiatan ini merupakan bagian dari internalisasi pembangunan berbasis PRB kepada bupati dan pemangku kepentingan terkait
- Fasilitator lokalnya (Pak Andi, BPBD Cilacap) berkesempatan untuk berbagi pengalamannya di Korea Selatan dan Mongolia



*RESULT FOR
SCORECARD :*
340/590

SCORECARD ASSESSMENT WITH PUBLIC HEALTH ADDENDUM (2020)



KOTA SAMARINDA



KOTA SEMARANG

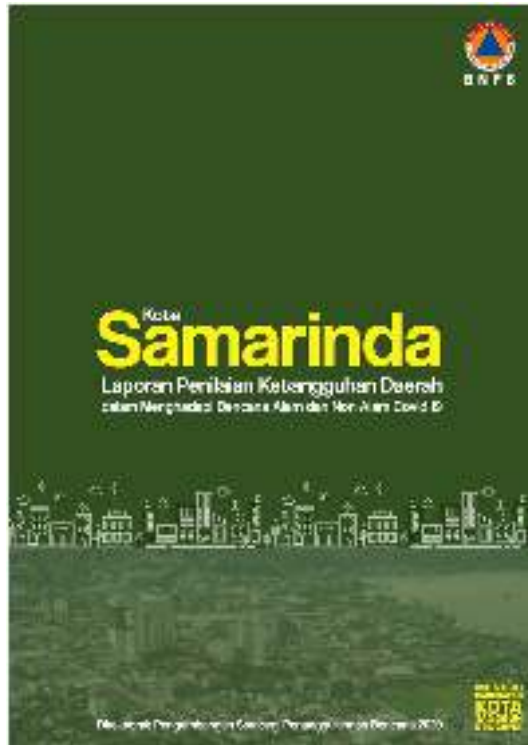


KAB. LUMAJANG



KAB. BADUNG

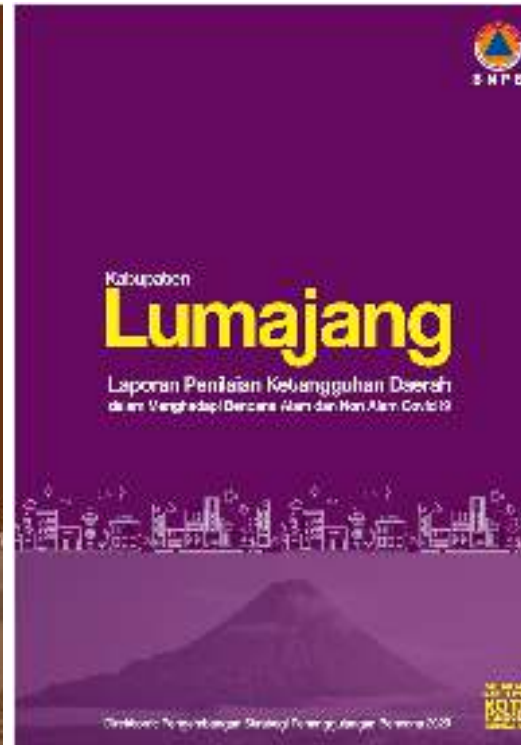
SCORECARD PUBLIC HEALTH ADDENDUM ASSESSMENT RESULTS BOOK (2020)



KOTA SAMARINDA



KOTA SEMARANG



KAB. LUMAJANG



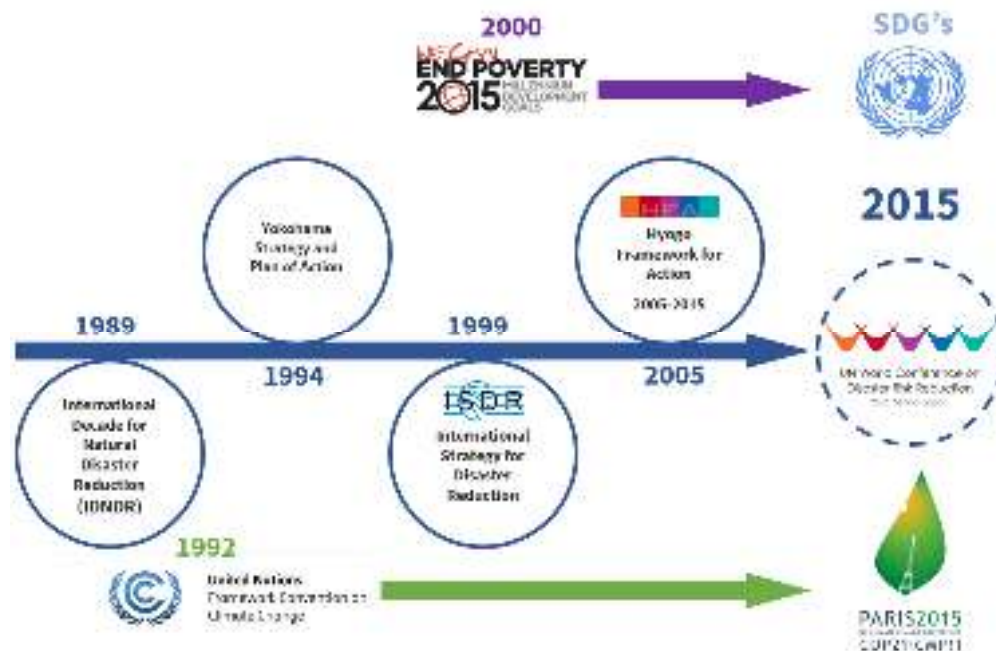
KAB. BADUNG



strategi

global mendorong perwujudan kabupaten kota tangguh bencana

SFDRR, SDGs, COP 21, NUA-UNHABITAT



Sustainable Development Goals (SDGs)

"World leaders have an unprecedented opportunity this year to shift the world onto a path of inclusive, sustainable and resilient development" - Helen Clark, UNDP Administrator.

At the United Nations Sustainable Development Summit on 25 September 2015, world leaders adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, which includes a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, fight inequality and injustice, and tackle climate change by 2030.



Keterkaitan Komitmen Global Terhadap Agenda Nasional



RPMN 2020-2024, RIPB 2020-2044 DAN RENAS PB 2020-2024

Pelaksanaan RIPB dan Renas PB merupakan pemenuhan komitmen agenda Global Target-E SFDRR dan Goal-11 dan 13 SDGS

Making cities resilient

MCR merupakan gerakan global yang diinisiasi Badan PBB untuk pengurangan risiko bencana atau *United Nations For Disaster Risk Reduction* (UNDRR) untuk mendorong komitmen ketangguhan pemerintah kota/kabupaten di seluruh dunia.

Lebih dari 4.300 kota telah menjadi bagian dari Kampanye **termasuk Indonesia**, menunjukkan komitmen yang meningkat untuk mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga dari bencana dan krisis.



keterkaitan dengan SDGs target 11

...membuat kota-kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sesuai tujuan 11 SDGs:

- **Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk lebih berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Kerangka Sendai untuk PRB yang terintegrasi dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030,**
- melalui penerapan manajemen risiko yang terpadu dan menyeluruh, partisipasi dalam jejaring Kota/Kabupaten Tangguh; **mendukung prakarsa-prakarsa yang mendorong tercapainya sekolah dan rumah sakit serta aset dan properti daerah penting lainnya yang aman dan berkelanjutan.**



Sustainable Development Goals (SDGs)

"World leaders have an unprecedented opportunity this year to shift the world onto a path of inclusive, sustainable and resilient development" - Helen Clark, UNDP Administrator.

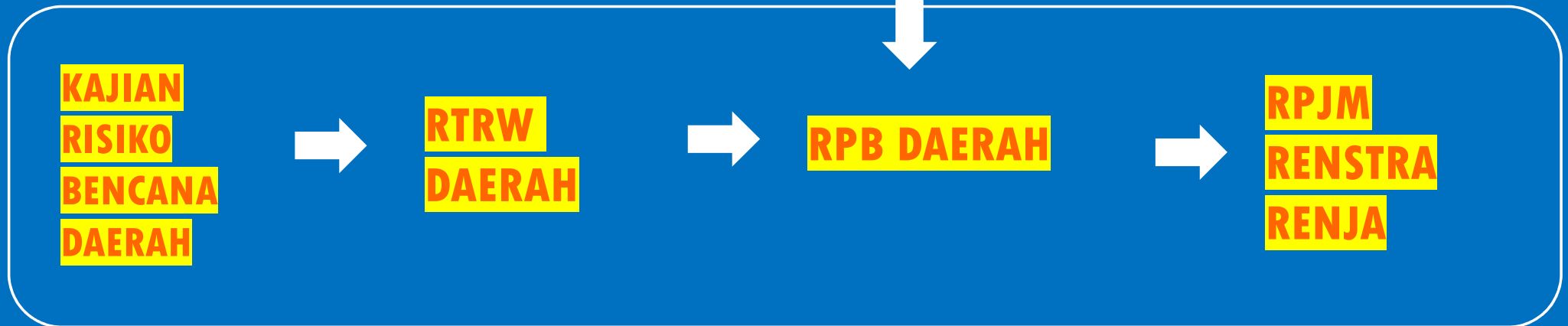
At the United Nations Sustainable Development Summit on 25 September 2015, world leaders adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, which includes a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, fight inequality and injustice, and tackle climate change by 2030.



strategi

Internalisasi
Agenda PRB
Ke Dalam
Pembangunan

daerah





strategi

kebijakan PB dan Ketangguhan Nasional

- 01** UU 24 Tahun 2007 pasal 35 dan 36
- 02** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
- 03** Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 5 dan 6
- 04** Perpres 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana
Perka 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB
- 05**

RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA

Perpres No.87 Tahun 2020 Rencana Induk PB Tahun 2020-2044



APA ITU RIPB?

Merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan PB yang berlaku selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi Kementerian/Kemungkinan, Tata Laku Nasional Indonesia, Kabupaten Negara (The public Indonesia) dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.



VISI PB DALAM RIPB 2020-2044

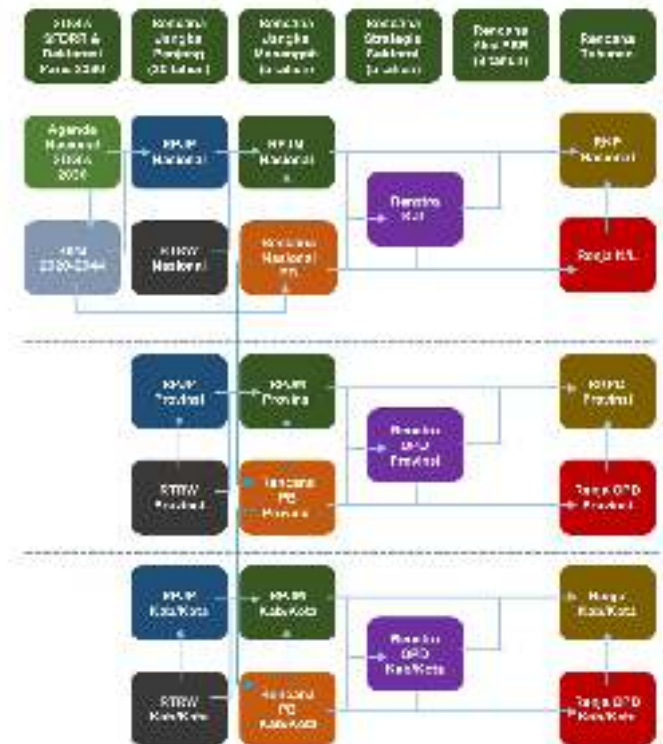
Terdapatkan Indonesia dengan Rencana untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tangguh bencana ber makna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap bencana, dan memiliki diri dari akibat bencana dan pemulihan dari bencana lebih cepat, efektif, dan efisien.



MISI PB DALAM RIPB 2020-2044

1. Menetapkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Menetapkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Menetapkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Keterkaitan Perencanaan PB dalam Sistem Pembangunan Nasional



Kebijakan dan Strategi RIPB 2020-2044



1 Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.



2 Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam PB.



3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risikodengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.



4 Penguatan tata kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.



5 Peningkatan kapasitas & kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.



6 Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

1

- Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam PB yang adaptif dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria PB.

2

- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam PB.
- Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.

3

- Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
- Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk PB.
- Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk PB.

4

- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku PB.
- Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal PB.
- Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam PB.
- Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola PB untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.
- Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
- Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan PB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

5

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
- Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
- Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
- Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.

6

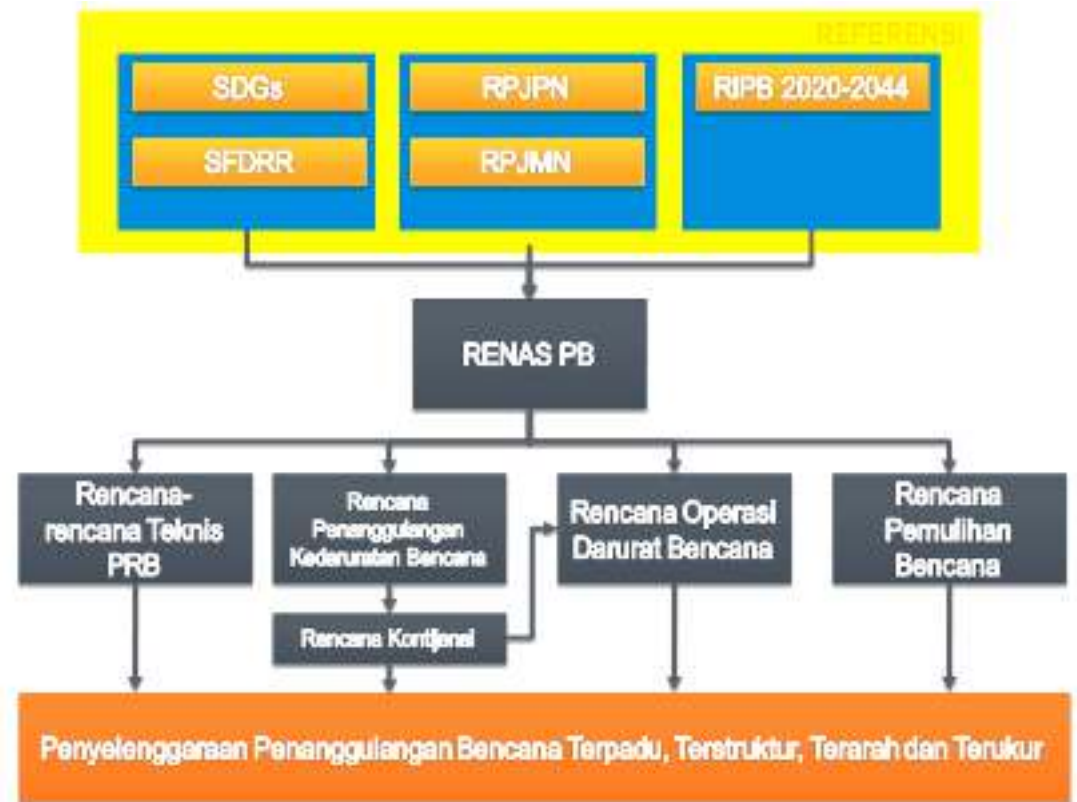
- Mengoptimalkan perencanaan rehab rekon pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.
- Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
- Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
- Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.



Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024

Dokumen Nasional Penanggulangan Bencana

Posisi RENAS PB dalam Perencanaan PB



Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Kebijakan dan strategi RENAS PB diturunkan dalam 27 aksi dan 119 indikator aksi.





Mewujudkan Daerah Tangguh Bencana dengan “Making Cities Resilient (MCR2030) di Indonesia

- MCR 2030 di Indonesia direncanakan akan diwujudkan dengan kolaborasi antara BNPB dengan UCLG ASPAC, Siap Siaga (DFAT), CARI, APEKSI/APKASI dan mitra pembangunan
- Bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus menjaring kolaborasi seluruh daerah untuk berkomitmen mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana
- Pengukuran ketangguhan awal dilakukan melalui perangkat *Making Cities Resilient Stage Assessment* dan kemudian dapat didetilkan menggunakan perangkat SPDAB (Standar Pengamanan Daerah Aman Bencana)
- Pengukuran ketangguhan merupakan **mekanisme identifikasi masalah** yang hasilnya menjadi rekomendasi dalam perencanaan pembangunan.

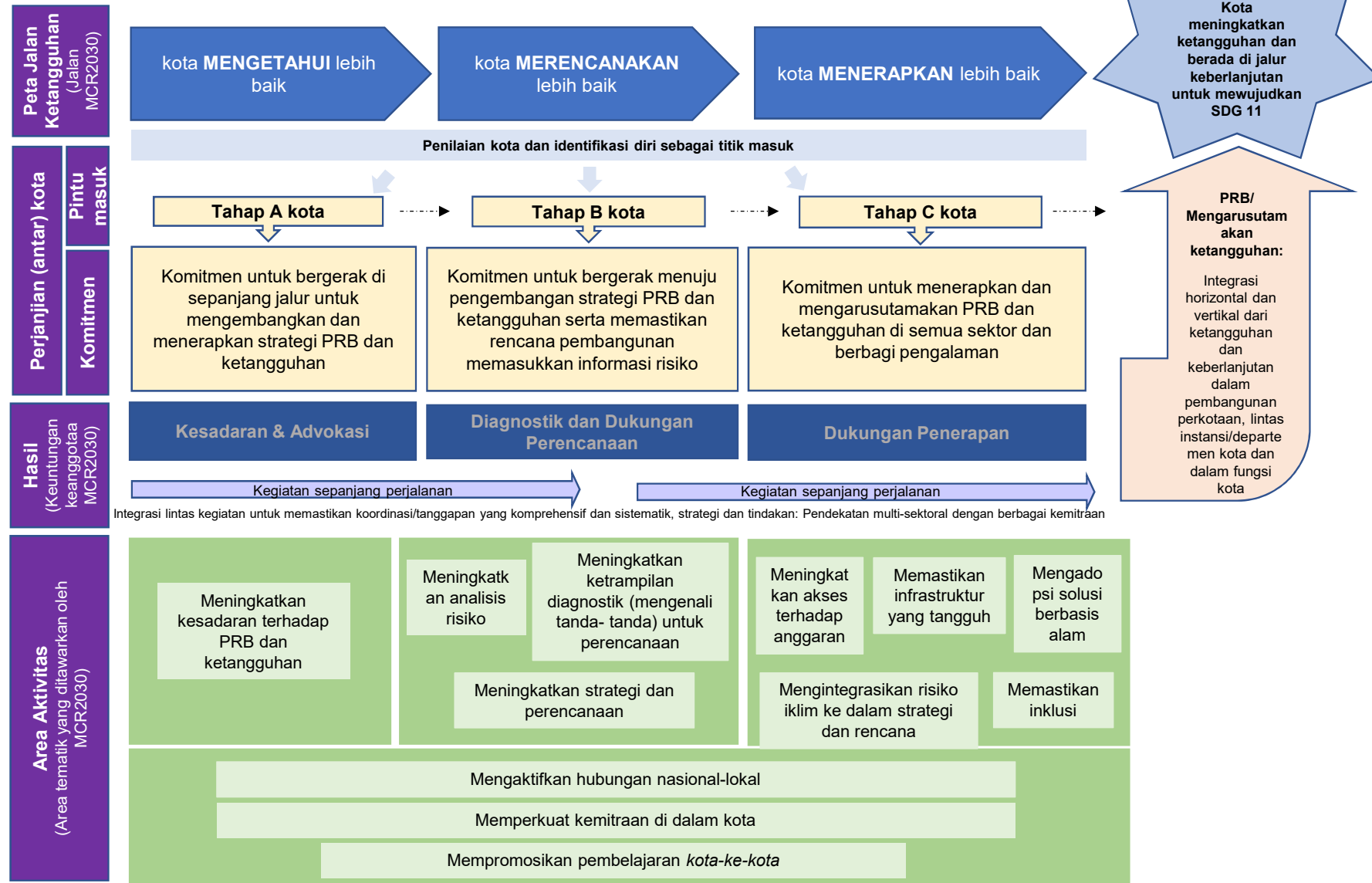


- Pada tahun 2021 ini BNPB berkolaborasi dengan Siap Siaga (DFAT) dan CARI melakukan penilaian ketangguhan daerah melalui perangkat *Making Cities Resilient Stage Assessment* dan SPDAB (Standar Pengamanan Daerah Aman Bencana)
- Perangkat Standar Pembangunan Daerah Aman Bencana (SPDAB) merupakan penyempurnaan dari Indeks ketangguhan Daerah (IKD), 10 langkah mendasar *ScoreCard*, SPM Sub-Urusan Bencana, serta ISO 37123:2019 terkait ketangguhan Kota. Perangkat ini bersifat penilaian mandiri dan lebih sederhana.
- Penilaian melalui perangkat *Making Cities Resilient Stage Assessment* dilaksanakan 514 Kabupaten dan Kota di Indonesia.
- Selanjutnya dilakukan penilaian menggunakan perangkat Standar Pembangunan Daerah Aman Bencana (SPDAB) pada 237 Kabupaten dan Kota berisiko tinggi dalam IRBI 2020.



- Pada tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah dari Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali.
- Salah satu agenda yang akan dilakukan adalah penyampaian sertifikat dari UNDRR kepada Kepala Daerah yang berkomitmen Sign Up MCR 2030
- Komitmen ketangguhan dari seluruh kabupaten dan kota akan selaras dengan visi ketangguhan Nasional. Hal ini menjadi capaian baik Indonesia dalam diplomasi kebencanaan.
- Untuk mewujudkan komitmen Kepala Daerah dalam Sign Up MCR 2030, BNPB berkolaborasi dengan UCLG Aspac, Apeksi, Apkasi dan mitra
- Pada tahun 2021 hingga 2024, Pemerintah Indonesia menargetkan lebih banyak kabupaten/kota yang turut mendaftar dalam gerakan MCR 2030.

Gambaran *Making Cities Resilient 2030* (MCR2030)



Hasil Penilaian MCR-2030 di beberapa kabupaten/kota di Indonesia

500 Kabupaten/Kota,
kriteria:

Stage A

33

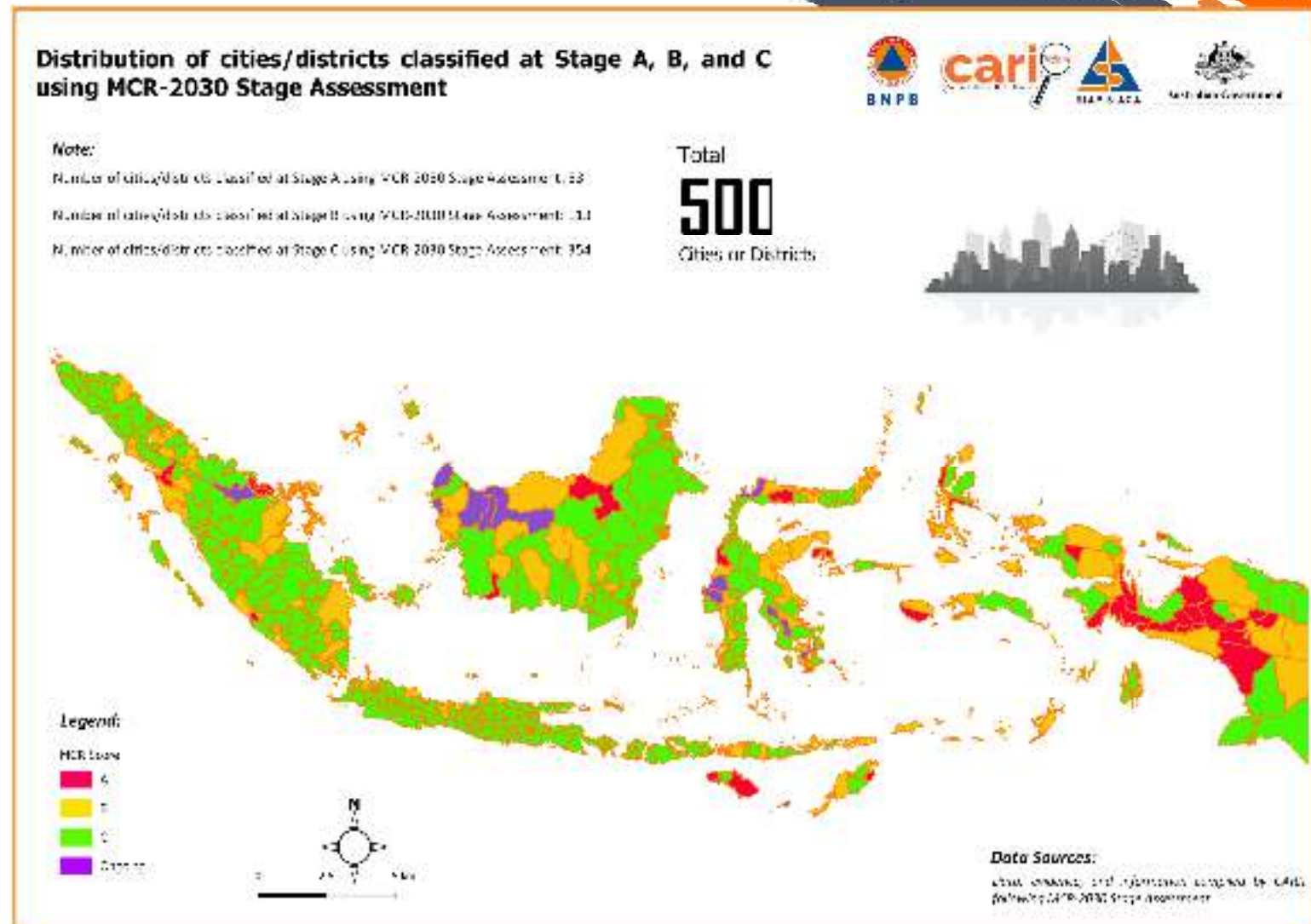
Stage B

113

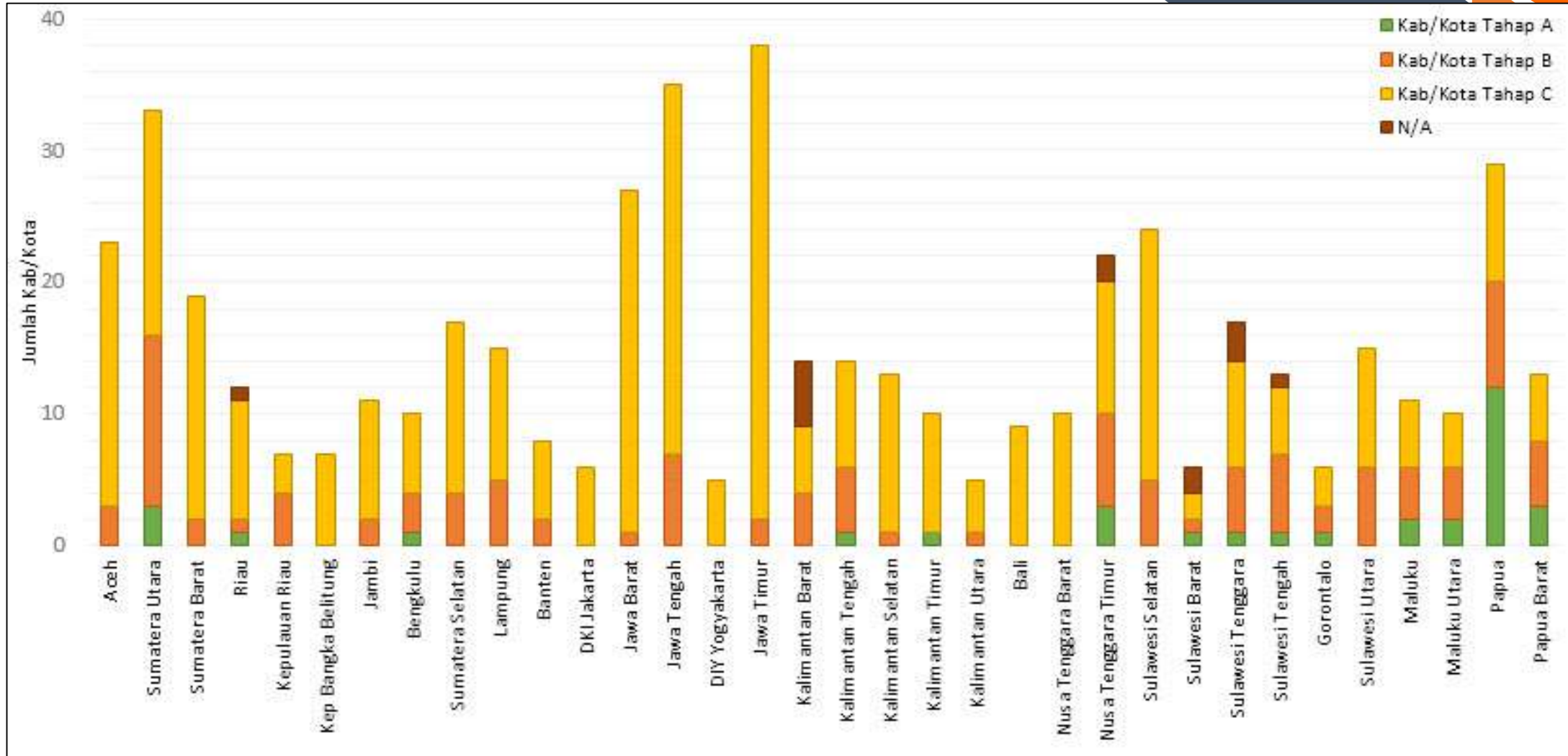
Stage C

354

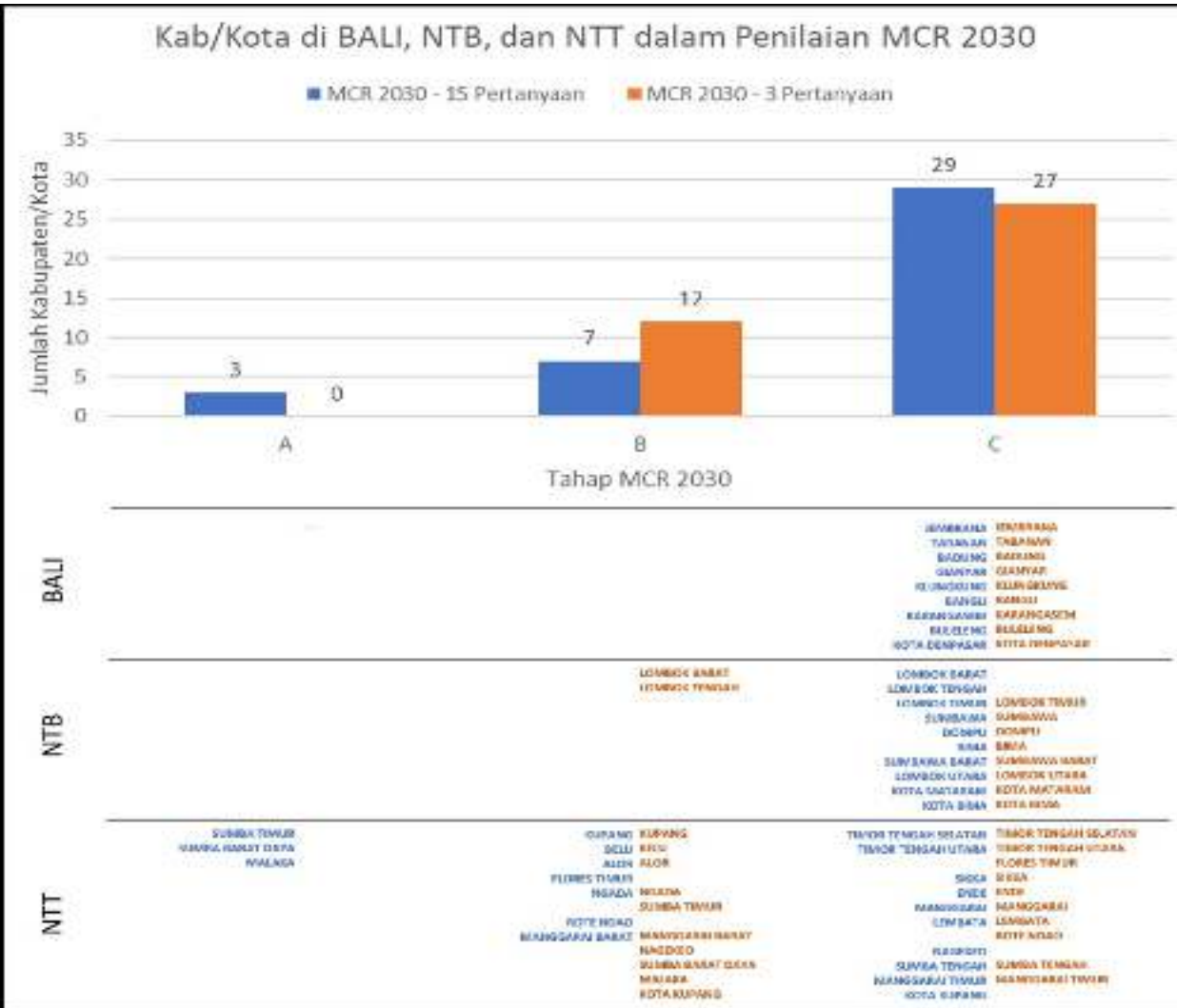
**HASIL SEMENTARA
MOHON TIDAK DIKUTIP**



Sintesa Sementara Hasil Kaji MCR- 2030 *Stage Assessment*



Hasil Penilaian MCR-2030 *Stage Assessment* di beberapa Provinsi



- ✓ Seluruh kab/kota di Provinsi Bali berada pada **Tahap C**, menurut hasil pengukuran menggunakan MCR-2030 Stage Assessment serta data/informasi pendukung dan bukti verifikasi yang dikumpulkan secara daring dan dikurasi oleh enumerator terlatih.
- ✓ Hal ini bermakna seluruh kab/kota di Provinsi Bali dasarnya sudah memiliki **dokumen perencanaan** untuk peningkatan ketahanan bencana serta terdapat integrasi muatan PB ke dalam perencanaan pembangunan.
- ✓ Dokumen rencana tersebut perlu didukung oleh para pihak agar dapat diwujudkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran menuju kota/kabupaten Tangguh yang seutuhnya sesuai Roadmap MCR2030.



Terima

Kasih

**“Indonesia Tangguh bencana
adalah visi dan kerja kita
Bersama”**